

## **Analisis Masalah Pada Konflik Papua Merdeka Dalam Kaitan dengan Kesenjangan Sosial Warga Indonesia**

**Mustika Maharani**<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Kasembon, Indonesia

<sup>1</sup> tikachan90@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### **Informasi artikel**

*Received: 7 Januari 2022;*

*Revised: 20 Januari 2022;*

*Accepted: 28 Januari 2022.*

### **Kata-kata kunci:**

Analisis Masalah;  
Kesenjangan Sosial;  
Konflik Papua;  
Warga Indonesia.

---

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah dengan fokus pada konflik Papua Merdeka yang dikaitkan dengan kesenjangan sosial dalam konteks warga Indonesia. Situasi konflik dalam kasus ini dapat dipahami dalam pemikiran yang mendasar dari Paul Feyerabend. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan dua sumber, pertama menggunakan jurnal yang berisi pemikiran Paul Feyerabend yang menitik beratkan pada pemikiran anarkisme epistemologi dan *anything goes*. Kedua adalah jurnal yang berisi analisis terhadap konflik Papua Merdeka itu sendiri. Hasil penelitian menemukan bahwa analisis masalah konflik Papua Merdeka bisa dijelaskan bahwa terdapat pertentangan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat Papua yang melahirkan ideologi “nasionalis Papua” dan “nasionalisme NKRI”. Adanya kesenjangan sosial diantara masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Papua dengan masyarakat Indonesia di wilayah lain ini menimbulkan adanya kecemburuan sosial yang ekstrim. Faktor ekonomi menjadi penyebab sekaligus faktor utama adanya kesenjangan ini yang menyebabkan warga Papua melakukan separatisme.

---

### **Keywords:**

*Problem Analysis;*  
*Conflict of Papua;*  
*Social inequality;*  
*Indonesians.*

---

### **ABSTRACT**

***Analysis of Problems in the Independent Papua Conflict in Relation to Social Inequalities among Indonesians.*** The aim of the study was to analyze the problem with a focus on the Free Papua conflict that is associated with social inequalities in the context of Indonesian citizens. The conflict situation in this case can be understood in the fundamental thinking of Paul Feyerabend. The research methods used in this study use literature research methods with qualitative approaches with case studies. The study used two sources, the first using a journal containing Paul Feyerabend's thoughts that focused on the thought of epistemological anarchism and anything goes. Second is a journal that contains an analysis of the Konflik Papua Merdeka itself. The results of the study found that the analysis of the problem of the Free Papua conflict could be explained that there was a conflict of views between the government and the Papuan people that gave birth to the ideology of "Papuan nationalist" and "NKRI nationalism". The existence of social inequalities between Indonesian people, especially people in Papua and Indonesian people in other regions, causes extreme social jealousy. Economic factors are the cause as well as the main factors of this gap that causes Papuans to commit separatism.

---

**Copyright © 2022 (Mustika Maharani). All Right Reserved**

How to Cite: Maharani, M. (2022). Analisis Masalah Pada Konflik Papua Merdeka Dalam Kaitan dengan Kesenjangan Sosial Warga Indonesia. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 2(1), 22–27. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i4.426>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Paul Feyerabend seorang pemikir yang menentang kebakuan sebuah ilmu pengetahuan, menentangakan pemikiran lama pada sains dan ilmu pengetahuan (Wahyudi, 2021). Hal tersebut mengedepankan metode dan kepastian yang bersifat statis dalam penerapannya. Feyerabend memiliki sebuah pemikiran baru terhadap ilmu pengetahuan kala itu, yakni anarkisme epistemologi. Anarkisme epistemologi merupakan pandangan dimana ilmu pengetahuan bahkan sains seharusnya diasumsikan tanpa terikat aturan apapun (*anything goes*), yang mana hal ini berarti semua ilmu pengetahuan itu harusnya fleksible dan tanpa aturan maupun batasan.

Saat ini, pemikiran Feyerabend ini sudah menjadi sebuah tonggak dalam memahami suatu fenomena dan ilmu pengetahuan modern. Hal ini tidak dapat kita pungkiri sebab seperti halnya kehidupan, ilmu pengetahuan pun bersifat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Pemikiran-pemikiran dan banyaknya ideologi baru pun muncul. Pemikiran dan ideologi ini tak selamanya menjadi sesuatu yang benar. Tak jarang sebuah ideologi justru menjadi sebuah bentuk cara berpikir manusia yang harusnya benar malah ingin “membenarkan”, sehingga usaha usaha dalam membenaran ini pun menjadi salah. Salah satu kasusnya adalah konflik Papua merdeka, dalam jurnal Johannes Rudolf Gerzon Djopari dimana ideologi “nasionalisme” di Papua menjadi dua kubu yang bertentangan. Penyebabnya tentu saja adanya kesenjangan-kesenjangan di beberapa bidang yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial dan terjadinya separatisme oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara sporadis di Papua (Noor, 2018).

Rumusan masalah penelitian ini memuat dua pertanyaan yaitu, pertama bagaimana konflik Papua Merdeka dapat dipahami dalam pemikiran Paul Feyerabend? Kedua, bagaimana ilmu pengetahuan memandang Konflik Papua Merdeka? Apakah separatisme merupakan penyimpangan dari pemikiran Paul Feyerabend (*anything goes*)? Penelitian ini memiliki hipotesis bahwa adanya hubungan antara pemikiran Paul Feyerabend terhadap ilmu pengetahuan, yakni anarkisme epistemologi yang melahirkan *anything goes* bagi ilmu pengetahuan dengan adanya gerakan separatisme sporadis dan ideologi nasionalisme di Papua, sehingga terjadinya konflik Papua Merdeka.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memperoleh data deskriptif (Arikunto, 2010). Pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan, sumber data penelitian berasal dari sumber-sumber yang telah terkumpul dari perpustakaan. Penelitian ini menggunakan beberapa literatur dengan dua perpaduan pembahasan. Yang pertama saya menggunakan jurnal yang berisi pemikiran Paul Feyerabend yang menitik beratkan pada pemikiran anarkisme epistemologi dan *anything goes*. Kedua adalah jurnal yang berisi analisis terhadap konflik Papua Merdeka itu sendiri. Penelitian ini sendiri berfokus pada masalah konflik Papua Merdeka dan bagaimana pemikiran yang telah dilahirkan Paul Feyerabend memandang kasus ini dan menuangkannya dalam pemikirannya.

## Hasil dan Pembahasan

Paul Feyerabend (1924-1994) merupakan seorang pemikir kelahiran Austria yang memiliki pandangan paling maju dan berani diantara para pemikir lainnya di masa abad ke-20 (Shofiyyuddin, 2015). Paul memiliki sebuah pemikiran baru terhadap ilmu pengetahuan kala itu, yakni anarkisme epistemologi. Kebanyakan pemikiran dari Feyerabend sebelumnya merupakan bentuk kritik terhadap pemikiran Popper yang berpangku pada pandangan bahwa ilmu pengetahuan sejatinya dibatasi oleh suatu metodologi yang pakem. Anarkisme epistemologi merupakan pandangan hasil pertentangan dan pemikiran kembali pandangan mengenai ilmu pengetahuan yang baku kemudian berkembang menjadi objektif dan dinamis dimana ilmu pengetahuan bahkan sains seharusnya diasumsikan tanpa terikat

---

aturan apapun (anything goes), yang mana hal ini berarti semua ilmu pengetahuan itu harusnya obyektif, dinamis dan tanpa aturan maupun batasan.

Buku *Against Method* menjadi salah satu contoh hasil pemikiran Feyerabend mengenai ilmu pengetahuan. *Against Method* memberikan sebuah pandangan bahwa suatu ilmu pengetahuan didapatkan bukan hanya dari satu metode baku saja tapi dari berbagai hal dalam pemikiran manusia yang kompleks dan dinamis (Feyerabend, 1993). Feyerabend juga menyebutkan bahwa jika ilmu pengetahuan hanya berlandaskan pada suatu metode saja dan adanya batasan-batasan tertentu dan mengikat maka tak ubahnya sebuah pandangan dogmatis seperti halnya agama, yang mana selalu benar, mengekang, dan tidak boleh dipertanyakan kebenarannya, sedangkan ilmu pengetahuan sejatinya didapatkan tanpa adanya batasan dan mengapa harus ada batasan dalam penerapannya? Pandangan Feyerabend ini kemudian dibuktikan dengan terus adanya ilmu-ilmu baru dan ilmu-ilmu lama pun terus berkembang sebagaimana perkembangan zaman. Menurut Feyerabend, suatu ilmu pengetahuan harus dan pasti mengalami perkembangan, menggantikan yang lama dan membenarkan yang salah pada teori yang lama yang mana tentu saja tidak relevan lagi jika kita komparasikan dimasa kini.

Konflik Papua Merdeka. Dikembalikannya Papua ke pangkuan NKRI pada 1 Mei 1963 setelah diakui secara resmi oleh PBB dan rakyat Papua sendiri pada tahun 1969 menjadi awal pembangunan di Papua itu sendiri. Kurang banyak hal ini mendapat banyak keikutsertaan politik di dalamnya. Proses integrasi politik di Irian Jaya menghadapi suatu tantangan yang utama dan berat. Pembangunan yang diselenggarakan di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan salah satunya rendahnya tingkat perkembangan kemajuan wilayah Papua dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Separatis atau separatisme merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka (Sefriani, 2016). Separatisme ini menjadi bentuk dari ketidakpuasan akan hasil dari situasi politik pada saat itu menimbulkan adanya kesenjangan sosial ini menimbulkan kecemburuan sosial yang tidak dapat kita hindari. Beberapa kelompok mulai membentuk suatu kelompok yang memiliki ideologi nasionalis yang bertentangan dengan negara Indonesia dalam upayanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. yaitu pemberontakan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tahun 1965 tepatnya pada tanggal 26 Juli di Manokwari yang dipimpin oleh Permenas Ferry Awom, bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua (Papua Vrijwilinger Corps) buatan Belanda.

Berbagai gerakan dan aksi baik dari dalam maupun luar Indonesia menjadi jalan dari pemberontakan-pemberontakan rakyat Papua. Aksi-aksi yang sebagian besar didukung negara-negara tetangga semakin menguatkan aksi separatisme ini. Dan tentu saja pemberontakan OPM ini terus berlangsung hingga saat ini meski pun secara sporadis. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa OPM itu lahir di Irian Jaya dari dua faksi utama pimpinan Terianus Aronggear, SE dan Aser Demotekay pada tahun 1964 dan tahun 1963. Kegiatannya sendiri terbagi menjadi dua yaitu kegiatan politik dan kegiatan militer. Kegiatan politik ini melibatkan dukungan dari negara-negara tetangga yang bernasib sama, sedangkan kegiatan militer dilakukan di Irian Jaya berbentuk pemberontakan. Akan tetapi, kegiatan politik di luar negeri ini sempat kurang efektif sebab terjadi perpecahan antara para pemimpin politik OPM dari segi orientasinya ada yang pro-Barat dan ada yang berorientasi ke neo-Marxis/Sosialis. Perpecahan ini jelas mempengaruhi faksi militer di Irian Jaya sehingga kegiatan mereka lemah dan mudah dipatahkan oleh Pemerintah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Berdasarkan telaah teori dan pendapat para sarjana dapat diungkap bahwa pemberontakan itu terjadi karena ketidakpuasan dan kekecewaan yang dialami oleh manusia dalam suatu sistem politik atau negara. Di Irian Jaya, bentuk dari pemberontakan yang dilakukan OPM antara lain, aksi perlawanan fisik bersenjata atau aksi militer yang dilakukan secara sporadis, aksi penyanderaan, aksi demonstrasi massa, aksi pengibaran bendera Papua Barat, aksi penempelan dan penyebaran pamflet/selebaran, aksi

---

rapat-rapat politik dan pembentukan organisasi perjuangan lokal, aksi pelintasan perbatasan ke Papua New Guinea, aksi pengrusakan/pembongkaran.

Pemerintah sendiri telah mengusahakan banyak cara untuk menghentikan gerakan separatisme ini. Pada era reformasi pemerintah memberikan sebuah otonomi khusus pada rakyat Papua, bahkan di era pemerintahan saat ini beberapa kali presiden Joko Widodo telah memberikan beberapa perhatian pembangunan di Papua terkait pembangunan infrastruktur dan ekonomi rakyat Papua. Akan tetapi, tentu saja hal ini belum menyentuh inti dari persoalan konflik di Papua itu sendiri. Dan hal ini tentu tidak dapat menghentikan penyebaran kelompok-kelompok yang menginginkan kemerdekaan bagi tanah Papua. Kemiskinan masih menjadi faktor utama dari aksi separatisme ini, hal ini sebab kemiskinan tak hanya mempengaruhi faktor ekonomi saja tapi juga pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan bagaimana pun ini sangat berbanding balik dengan wilayah lain di Indonesia, contohnya Jakarta. Jika dibandingkan, di Jakarta mungkin sekitar 3,4 persen penduduk miskin. Sedangkan di Papua hampir separuh penduduknya memiliki kesulitan ekonomi. Hal ini pun mengakibatkan kesenjangan berkelanjutan dan semakin meluas kian harinya. Selain itu, Kekuatan diplomasi internasional yang sejak lama dimiliki oleh masyarakat Papua pun turut serta menguatkan gerakan separatisme sporadis di wilayah Papua.

Kemudian dampak dari separatisme terhadap timbulnya ideologi nasionalisme dan pembentukan integrasi politik di Irian Jaya adalah semakin kuat keikutsertaan dan dukungan rakyat Papua terhadap OPM yang semakin melahirkan banyaknya aksi pemberontakan yang tak pernah usai hingga kini, bahkan dalam kurun waktu 20 tahun, lewat gerakan separatisme sporadis OPM mampu mensosialisasikan nilai-nilai "nasionalis Papua" sebagai ideologi OPM kepada rakyat Irian Jaya dibandingkan nasionalisme NKRI itu sendiri (Hadi, 2017; Saputra, 2017).

Analisis masalah konflik Papua Merdeka bisa dijelaskan dalam pemikiran Paul Feyerabend. Penjelasan mengenai Konflik Papua Merdeka dan pemikiran Feyerabend terhadap ilmu pengetahuan ini dapat kita ambil sebuah pemahaman bahwa dalam kasus Konflik Papua merdeka ini terdapat pertentangan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat Papua yang melahirkan ideologi "nasionalis Papua" dan "nasionalisme NKRI". Berangkat dari adanya kesenjangan sosial diantara masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Papua dengan masyarakat Indonesia di wilayah lain ini menimbulkan adanya kecemburuan sosial yang ekstrim. Mengingat ekonomi menjadi penyebab sekaligus faktor utama adanya kesenjangan ini, kemudian mendorong masyarakat Papua melakukan separatisme dengan tujuan kehidupan yang lebih baik di bawah pemerintahan politik negara lain maupun berdikari. Untuk mempertentangkan pandangan ini kita juga perlu melihat bagaimana pemerintah melihat Konflik Papua Merdeka ini. Hal ini dapat kita lihat dari sudah banyak usaha dari pemerintah sendiri untuk menekan gerakan separatisme yang terjadi di Papua, akan tetapi pendekatan integrasi yang terjadi dan terus berusaha dicanangkan sampai saat ini belum mampu menekan separatisme di Papua (Hadi, 2007; Redaksi, & Isi, 2005).

Dari sini dapat kita telaah bahwa sama halnya pemikiran Feyerabend terhadap kebakuan metodologi ilmu pengetahuan dengan teori sebelumnya, menimbulkan pertentangan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian ilmu pengetahuan lama dengan zaman yang ada. Karena adanya ketidaksesuaian inilah Feyerabend mencetuskan bahwa ilmu pengetahuan harusnya senantiasa berubah dan dinamis menyesuaikan keadaan saat itu. Dan dari sini pula konflik ini dapat kita lihat sebagai bentuk pertentangan sejak pemerintahan politik lama sampai sekarang, karena masih adanya ketidaksesuaian dan kesenjangan di dalamnya. Jika merujuk pada pandangan anarkisme epistemology dari Feyerabend antiscience, maka dapat kita hubungkan pula bahwa adanya ideologi nasionalis Papua, menentang adanya prinsip integrasi nasionalisme Indonesia yang menjunjung tinggi UU dan Pancasila, yang mana seharusnya tidak hanya adanya pendekatan fisik namun juga perlu adanya pendekatan secara budaya. Seperti halnya para kelompok separatis yang memahami konteks kesejahteraan sebagai perbandingan

antara pembangunan fisik, kemajuan ekonomi dan keadilan sebagai bentuk kesejahteraan yang harusnya dimiliki semua orang.

Hal ini mungkin kita tidak heran lagi jika adanya dukungan diplomatis secara Internasional dalam aksi separatisme ini, tentu saja selain bentuk dari pertentangan dalam nilai nasionalis Indonesia itu sendiri hal ini merupakan bentuk dari pelepasan kebebasan tanah papua yang terkekang oleh banyaknya masalah yang sudah sejak dulu ada, atau bisa kita dibaratkan sebagai (*anti-science*) dalam pemikiran Feyerabend atau dapat kita pahami secara singkat bahwa UU, Pancasila dan, dan politik pemerintahan lama merupakan perumpamaan bagi ilmu pengetahuan baru yang statis dan kaku, kemudian timbul pertentangan untuk membuat suatu kesesuaian dan keadilan sosial (Bahar, 2020).

## Simpulan

Pemikiran Feyerabend yang menentang ilmu pengetahuan dengan metodologi baku dan aturan ketat yang mengelilinginya, kemudian menekankan bahwa ilmu pengetahuan haruslah dinamis dan bebas ini melahirkan banyak ideologi-ideologi baru. Dan tak sampai disana, ideologi ini kadang disalahartikan menjadi sesuatu yang negatif. sama seperti kita memandang kasus Konflik Papua Merdeka, di mana adanya dualisme ideologi di dalam masyarakat Papua, yakni ideologi nasionalis papua dan nasionalis NKRI. Oleh karena itu perlu adanya integrasi politik yang baik di Papua untuk menghilangkan ideologi nasionalis Papua yang dicanangkan OPM serta melakukan pendekatan humanis kultural dalam menciptakan integrasi itu sendiri.

## Referensi

- Arikunto, S. (2010). Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahar, M. S. (2020). Legal GAP: pertentangan hukum masyarakat dan hukum negara. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 10(1), 54-72.
- Djopari, J. (2016). Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik Di Irian Jaya Dari Tahun 1964 Sampai Dengan Tahun 1984). Perpustakaan Universitas Indonesia. UI - Tesis. Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
- Feyerabend, P. (1993). *Against method*. Verso.
- Hadi, R. P. (2017). Strategi Perang Informasi (Netwar) dan Perjuangan Non-violent dalam Upaya Pemisahan Diri Papua di Indonesia. *Transformasi Global*, 4(1).
- Hadi, S. (2007). Disintegrasi pasca Orde Baru: negara, konflik lokal, dan dinamika internasional. Yayasan Obor Indonesia.
- Jr. Martin Luther King. (2008). Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES).
- Ngatiyem. (2007). Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia). Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
- Noor, F. (2018). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 19-46.
- Qoharudin, I. (2016). Separatisme Organisasi Papua Merdeka Di Tinjau Dari Nilai Pendidikan Gotong Royong Sebagai Strategi Ketahanan Negara. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, Madiun, Indonesia
- Redaksi, D., & Isi, D. (2005). Integrated Approach. *Jurnal JAS Edisi II*, 11(38), 2.
- Saputra, A. (2017). Menguatnya Politik Identitas dan Problem Kerukunan Beragama di Manokwari. *Mimikri*, 3(1), 15-27.
- Sefriani. (2016). Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka. UNISIA No. 47/XXVI/I/2003
- Shofiyyuddin, M. (2015). Anarki Epistemologis Paul Karl Feyerabend dan Relevansinya Pada Epistemologi Tafsir Al-Quran. dalam *Hermeneutika*, 9(1).
-

- Tahir, M. (2016). Kontribusi Pemikiran Filsafat Anarkisme Epistemologis Paul K. Feyerabend Terhadap Studi Islam. *Lentera*, Vol. XVIII, No. 2.
- Wahyudi, M. N. (2021). Epistemologi Islam di Era Modern: Studi Analisis Pemikiran Feyerabend tentang Anarkisme Epistemologi. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 134-148.
- Widarda, D. (2019) . Demokrasi Sosial dalam Pemikiran Paul Feyerabend. Vol 2, No 2